



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

JL. SEI BATUGINGGING NO 06 MEDAN Kec. Medan Baru Kode Pos : 20154

Website : <http://dkp.sumutprov.go.id/>

Facebook : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumut

Telp : 061-4568819/4153335

m swordcoverpages.com

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022**

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Proses dan tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 juga disusun dengan memperhatikan evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2020 serta dinamika lingkungan yang terjadi diantaranya dampak sosial dan

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022**



Gambar 1. Alur Proses Penyusunan Renja Tahun 2022

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kesempatan pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintah dan urusan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk kepentingan masyarakat berdasarkan potensi daerahnya. Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah.

Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang Perencanaan Jangka Panjang. Perencanaan Jangka Menengah maupun Perencanaan Tahunan sebagaimana diamanatkan oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPN). Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022**

perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Upaya pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara dilandaskan atas potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, pemanfaatan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana serta sarana pendukung produksi. Faktor pendukung produksi juga meliputi peraturan perundang-undangan yang kondusif pendampingan. Selanjutnya, pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara juga merupakan upaya pemberian berbagai alternatif pilihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan (welfare) hidupnya, sekaligus sebagai upaya peningkatan kualitas manusia dan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan basis komoditas unggulan

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022**

yang kompetitif berlandaskan kemampuan regional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Apabila peluang dan prospek yang terbuka dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan permasalahan yang dihadapi dapat diatasi secara bertahap maka bukan suatu pilihan yang salah, jika sektor kelautan dan perikanan dijadikan andalan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara saat ini dan dimasa yang akan datang. Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Sumatera Utara untuk Tahun 2022. Dimana Renja merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sehubungan dengan itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, sebagai salah satu instansi membuat dan menyusun dokumen perencanaan dalam periode 1 (satu) tahunan berupa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Renja tahun 2022 disusun berdasarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, sekaligus merupakan Rencana Kerja tahun ke empat RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023. Rencana kerja disusun berdasarkan usulan-usulan dari kabupaten/kota melalui forum perangkat daerah, Musrenbang kabupaten/kota dan provinsi dan pokok-pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang di input kedalam aplikasi SIPD. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam hal ini kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sebagai instansi yang mengurus bidang Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud di atas untuk tahun 2022 melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022**

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No 42 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan proses pemetaan (*mapping*) kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kegiatan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dan sebagai upaya untuk mengakomodasi 4 (empat) tujuan, yaitu:

1. Tujuan ekonomi, yaitu mengembangkan sistem pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
2. Tujuan ekologis, yaitu melindungi dan memperbaiki ekosistem wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Tujuan sosial, yaitu memulihkan dan menjamin hak dan kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
4. Tujuan administratif, yaitu meminimalkan adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan dan pengelolaan

sumberdaya kelautan dan perikanan sehingga tercapai suatu keterpaduan dan berkelanjutan program.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra PD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan

Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022**

2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan PD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 **Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. **Review Terhadap Rancangan Awal Renja**

2.5. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022

- 3.1 **Telaahan terhadap kebijakan Nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD;
- 3.2 **Tujuan dan Sasaran Renja PD**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD ;

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup,

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun 5 seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan Renstra Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dan Capaian Renstra Tahun 2019-2023

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program/kegiatan dan Pengukuran kinerja berdasarkan sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022.

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022

Produksi Perikanan Sumatera Utara tahun 2021 sebesar 653.793,27 ton atau 103 % dari target 634.701,24 ton yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021. Kenaikan jumlah produksi perikanan Sumatera Utara disebabkan adanya bantuan yang diberikan Provinsi Sumatera kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan Sumatera Utara sehingga produksi perikanan dapat meningkat. Pada awal tahun 2020 yang lalu, dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Sumatera Utara, dimana produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya mengalami penurunan yang sangat signifikan sehingga target pada tahun 2020 tidak tercapai.

Pengukuran kinerja program/kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran terhadap Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan melalui tahapan sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Capaian produksi perikanan tangkap tahun 2021 sebesar 439.657, 60 ton atau 101,53 % dari target produksi perikanan tangkap tahun 2021 sebesar 433.032,24 ton. Tercapainya produksi perikanan tangkap tahun 2021 dikarenakan adanya bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Nelayan di Sumatera Utara.

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022**

**TABEL 1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**

No	Capaian Indikator	Target 2021	Realisasi	Persentase %
1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	433.032,24	439.657,60	101,53

Penurunan jumlah produksi perikanan tangkap yang cukup signifikan ini disebabkan karena beberapa faktor yang terjadi selama tahun 2020. Awal tahun 2020, seluruh negara di dunia termasuk Indonesia terjadi pandemi Covid-19, sehingga nelayan tidak melakukan aktifitas melaut karena adanya peraturan dari pemerintah dan kekhawatiran terjangkit Covid-19. Akibatnya, produksi perikanan tangkapan nelayan mengalami penurunan. Selain itu, harga ikan hasil tangkapan nelayan juga mengalami penurunan karena banyak restaurant yang tidak beroperasi selama covid-19. Harga ikan hasil tangkapan nelayan turun drastis mencapai 50 %. Hal ini tentunya tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan selama melaut untuk menangkap ikan.

Untuk memacu peningkatan volume produksi perikanan tangkap, ke depan perlu dilakukan upaya dan kegiatan antara lain optimalisasi operasional bantuan sarana penangkapan ikan (kapal dan alat tangkap), , peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, Optimalisasi pendataan produksi perikanan tangkap di

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022**

pusat-pusat pendaratan termasuk tangkahan, Penguatan pendataan dan penambahan SDM pengumpulan data di area WPP 571 dan WPP 572.

b. Program Pengelolaan Budidaya Perikanan

Realisasi produksi perikanan budidaya Sumatera Utara pada tahun 2021 sebesar 214.135,64 ton atau 106,18 % dari target yang ditetapkan pada RPJMD 2019-2023 Provinsi Sumatera Utara. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi capaian produksi tersebut yaitu, bantuan benih ikan dan benur udang kepada pembudidaya ikan dan udang serta pemberian bantuan pakan ikan/udang kepada pelaku usaha budidaya ikan di beberapa kabupaten/kota Sumatera Utara. Dalam mengantisipasi harga pakan ikan yang melonjak karena produsen pakan ikan menaikkan harga disebabkan covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020, maka Provinsi Sumatera Utara memberikan stimulus kepada pelaku usaha pembudidaya ikan dalam rangka pemulihan ekonomi di Sumatera Utara.

**TABEL 2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM PENGELOLAAN BUDIDAYA PERIKANAN**

No	Capaian Indikator	Target 2021	Realisasi	Persentase %
-----------	--------------------------	--------------------	------------------	---------------------

1	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	201.669	214.135,64	106,18
---	-----------------------------------	---------	------------	--------

c. Program Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

**TABEL 3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**

No	Capaian Indikator	Target 2021	Realisasi	Persentase %
1	Kawasan Konservasi Perairan (Ha)	25.000	25.000	100 %
2	Rehabilitas Ekosistem Terumbu Karang (m ²)	52.031	1.079	
3	Rehabilitas Ekosistem Mangrove (Ha)	39	10	25,64

Pencapaian indikator kinerja pada program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat menunjukkan capaian yang kurang memuaskan. Hal ini dikarenakan target yang telah ditetapkan tidak dapat terealisasi disebabkan pengurangan anggaran sehingga luas kawasan yang akan direhabilitasi menjadi berkurang.

Kegiatan Pengembangan Mata Pencarian Alternatif Bagi Masyarakat Pesisir merupakan kegiatan bagi para nelayan sebagai pencarian alternatif ketika nelayan tidak bisa melaut untuk menangkap ikan dengan cara budidaya ikan lele dengan menggunakan kolam terpal. Tahun 2021.

e. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

**TABEL 4. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN
PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN**

No	Capaian Indikator	Target 2021	Realisasi	Persentase %
1	Angka Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kapita/Tahun)	46,91	47,84	100

Capaian angka konsumsi ikan Sumatera Utara tahun 2021 mencapai 47,84 Kg/kapita/Tahun. Capaian ini selaras dengan kenaikan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebagai sumber protein yang berbahan baku ikan. Angka konsumsi ikan ini dapat tercapai disebabkan karena pandemik Covid-19 yang membutuhkan asupan protein dalam meningkatkan imun tubuh masyarakat. Jumlah konsumsi ikan tahun 2021 meningkat bila dibandingkan dengan angka konsumsi ikan masyarakat dikarenakan kampanye yang terus digalakkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Gerakan Memasyarakatkan

Makan Ikan (Gemarikan) yang merupakan program nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara merupakan penjabaran visi, misi, sasaran, dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu **“Sumatera Utara yang Maju Aman dan Bermartabat”** dan dijabarkan dalam 5 (lima) misi, yaitu :

Misi 1 : Bermartabat dalam kehidupan.

Misi 2 : Bermartabat dalam berpolitik.

Misi 3 : Bermartabat dalam pendidikan.

Misi 4 : Bermartabat dalam pergaulan.

Misi 5 : Bermartabat dalam lingkungan.

Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Sehubungan dengan hal di atas, pengumpulan data kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data kinerja yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggung jawab

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022

dalam pencatatan. Perolehan data kinerja bersumber dari internal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang secara sistematis didasarkan pada laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari unit-unit pelaksana dilingkungannya dan dari eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara seperti Badan Pusat Statistik.

Pada akhir tahun data-data tersebut dirangkum dan diolah serta dikomunikasikan kembali kepada unit-unit pelaksana untuk memperoleh klarifikasi dan penyesuaian seperlunya. Kedua data tersebut selanjutnya diolah dan dirangkum untuk disajikan.

Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

2.3 Analisis Capaian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan bagian integral dari kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan. Pada tahun 2020 Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Sumatera Utara melaksanakan program kegiatan. Seluruh program dan kegiatan pada 2020 dilaksanakan dengan baik. Realisasi anggaran menurut program-program tersebut seperti terlihat pada Tabel 5. Adapun dapat kami jelaskan bahwa realisasi anggaran yang utama adalah kegiatan kepada masyarakat (khususnya nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan dan masyarakat pesisir yang tertuang pada lima program).

Table 5. Realisasi Anggaran menurut Program Dinas Kelautan dan Perikanan.

No	PROGRAM	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.744.554.313	30.008.333.780,90	94,53 %
2	PENGLOLAAN PERIKANAN TANGKAP	13.281.011.703	12.875.703.967,00	96,95 %
3	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.936.479.920	11.314.734.670,00	87,46 %
4	PENGLOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.863.737.004	1.682.026.403,00	90,25 %
5	PENGLOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	7.761.227.538	7.406.136.304,00	95,42 %
6	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.409.447.090	2.165.887.527,00	89,89 %
	TOTAL	69.996.457.568	65.452.822.651,61	93,51 %

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa jumlah anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 69.996.457.568 dengan realisasi sebesar Rp. 65.452.822.651,61 atau 93,51 %

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022

Jumlah anggaran dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mencapai sasaran strategis pada tahun 2021 dipandang cukup efektif dengan memberikan hasil yang baik. Hal ini diharapkan memberikan dampak yang positif bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk terus saling bekerja sama dan saling mendukung dalam kemajuan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sumatera Utara pada tahun-tahun mendatang.

2.4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi OPD

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan urusannya, maka arah pembangunan kelautan dan perikanan Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Arah pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 mengacu kepada pelaksanaan tahun keempat Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara serta RPJMD Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2019-2023. Rencana pembangunan kelautan dan perikanan pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2019-2023 ditujukan dalam rangka memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada peningkatan daya

saing, ketahanan pangan dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.

2. Tantangan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2019– 2023 antara lain adalah :

A. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil

1. Keterbatasan sarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
2. Batas wilayah perairan antara Indonesia dengan Negara tetangga belum tuntas diselesaikan;
3. Masih tingginya jumlah masyarakat pesisir yang tergolong kedalam masyarakat miskin;
4. Pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil belum optimal;
5. Belum adanya Regulasi (Peraturan Daerah) yang mengatur pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. Terjadinya kerusakan terumbu karang dan hutan mangrove di kawasan budidaya perikanan;
7. Masih terjadinya pencurian ikan oleh kapal asing;

B. Penangkapan Ikan

1. Kapal ikan menangkap ikan tanpa dokumen yang sah, seperti;
 - a. Tanpa IUP/SIPI, atau telah habis masa berlakunya,

- b. Surat ijin tidak sesuai dengan kondisi kapal yang sebenarnya, seperti: penangkapan ikan dengan alat terlarang dan Pelanggaran jalur penangkapan ikan
- 2. Terjadinya pencemaran di perairan umum dan pantai;
- 3. Terjadi kesenjangan pemanfaatan SDI di perairan Sumatera Utara antara pantai barat dan pantai timur;
- 4. Meningkatnya biaya operasional untuk melakukan penangkapan ikan yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM dan oli;
- 5. Jumlah kapal perikanan tangkap masih didominasi perahu kecil ukuran <5GT dan alat tangkap tradisional dengan produksi yang masih rendah;
- 6. Produksi perikanan masih didominasi oleh hasil tangkapan di laut;
- 7. Daerah penangkapan ikan (fishing ground) yang terbatas;
- 8. Penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang penangkapan ikan masih terbatas;
- 9. Rendahnya mutu hasil tangkapan ikan nelayan yang berakibat kepada rendahnya harga jual ikan;
- 10. Terbatasnya bahan baku kayu sebagai bahan pembuatan kapalperikanan

c. Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan

1. Penanganan dan pengolahan hasil perikanan yang belum memperhatikan standar kesehatan;
2. Akses permodalan bagi usaha bidang kelautan dan perikanan masih terbatas;
3. Tingkat pendidikan dan keterampilan pengolah dan pemasar hasil perikanan masih rendah;
4. Belum semua parameter uji untuk pengujian produk hasil perikanan terakreditasi;
5. Jenis peralatan uji di PMHP belum lengkap;
6. Belum optimalnya diversifikasi produk ekspor hasil perikanan Sumatera Utara;
7. Ketersediaan bahan baku untuk UPI yang melakukan kegiatan ekspor hasil perikanan masih terbatas;
8. Belum semua UPI dan supplier memiliki Serifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
9. Mutu hasil perikanan yang di ekspor oleh UPI belum sesuai dengan permintaan pembeli luar negeri;
10. Pengelolaan usaha penangkapan ikan oleh sebagian besar pelaku usaha belum dilandasi dengan kaidah-kaidah pengelolaan usaha yang baik;

d. Budidaya Perikanan

1. Meningkatnya harga pakan sehingga meningkatkan biaya produksi;

2. Belum tuntasnya penanganan penyakit ikan, khususnya pada pembudidayaan udang;
 3. Belum optimalnya penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); Terbatasnya akses permodalan;
 4. Penyakit ikan dan udang.
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara
- a. Meningkatnya produksi perikanan baik perikanan tangkap dan budidaya di Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan khususnya nelayan, pembudidaya ikan serta pengolah dan pedagang hasil perikanan di Sumatera Utara
 - b. Meningkatnya ekspor hasil perikanan di Provinsi Sumatera Utara dalam rangka peningkatan devisa
 - c. Meningkatnya konsumsi ikan di Provinsi Sumatera Utara
 - d. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Utara
4. Peluang dan tantangan pelayanan OPD Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

- a. Pemberdayaan Ekonomi masyarakat pesisir
 - Menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
 - Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir
- b. Pengembangan pesisir dan pulau-pulau terluar.
 - Meningkatkan kesejahteraan seluruh pelaku usaha perikanan, khususnya nelayan, pengolah dan pedagang hasil perikanan serta pembudidaya ikan tradisional di kawasan pesisir
 - Meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan.
 - Memelihara kelestarian sumberdaya Kelautan dan Perikanan beserta ekosistemnya.
- c. Pengembangan usaha hasil perikanan
 - Mengembangkan usaha hasil perikanan yang mampu menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, nilai tambah bagi masyarakat nelayan khususnya di pedesaan, mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
 - Diversifikasi hasil olahan perikanan
 - Peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan
 - Penerapan rantai dingin.

- d. Peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat.
 - Terwujudnya peningkatan investasi dan peluang usaha bidang Kelautan dan Perikanan
 - Menjadikan laut sebagai perekat kesatuan dan persatuan NKRI.
- e. Pengembangan budidaya perikanan
 - Meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan
 - Menyediakan induk dan benih unggul
 - Pencegahan hama penyakit dan ikan
 - Restocking perairan umum
 - Pembangunan /perbaikan dempon
 - Pembangunan/perbaikan saluran irigasi
- f. Pengembangan perikanan tangkap
 - Meningkatkan pendapatan nelayan
 - Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan
 - Pembangunan /rehabilitasi Pelabuhan perikanan
 - Pembangunan /rehabilitasi Pangkalan pendaratan Ikan
 - Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana penangkapan ikan lainnya
 - Pemberdayaan nelayan skala kecil
- g. Pengembangan perikanan, kelautan, masyarakat pesisir sebagai berikut :

- Meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Meningkatkan nilai riil sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta perikanan dan peningkatan peranan produk dan jasa maritim dan kelautan.
- Meningkatkan pemantapan status kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Meningkatkan peningkatan pengelolaan berbasis masyarakat dalam upaya rehabilitasi dan konservasi habitat pesisir, laut dan perairan umum.
- Terwujudnya peningkatan investasi dan peluang usaha bidang Kelautan dan Perikanan.
- Meningkatkan pengendalian sumberdaya perikanan

5. Formulasi Isu-isu penting

b. Pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara tahun 2021.

Selama tahun 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan kelautan perikanan daerah dengan capaian kinerja yaitu :

1. Produksi hasil perikanan tangkap pada tahun 2021 sebesar 439.657.65 ton
2. Produksi hasil budidaya perikanan pada tahun 2021 sebesar 214.135, ton
3. Konsumsi ikan masyarakat Sumatera Utara pada tahun 2021 sebesar 47,84 kg/kap/thn

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Kebijakan pembangunan daerah merupakan kebijakan yang berkaitan dengan Program Kepala Daerah terpilih, sebagai arah bagi OPD maupun lintas OPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kebijakan pembangunan daerah disusun berdasarkan strategi Pembangunan Daerah Gubernur terpilih sesuai visi dan misinya juga mengacu pada agenda Pembangunan Nasional (RJPM Nasional) dan Provinsi Sumatera Utara (Dokumen Perencanaan Daerah Sumatera Utara). Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara dalam tahap penyusunan Tahun 2021 yang disesuaikan dengan visi misi Gubernur terpilih yang dilantik pada bulan September 2018

Pembangunan kelautan dan perikanan di Sumatera Utara pada tahun 2022 meliputi:

1. Peningkatan daya saing perikanan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi dan nilai tambah produk.
2. Pengembangan dan pengawasan sistem jaminan mutu produk hasil perikanan dan jaminan ketersediaan bahan baku industri.
3. Pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan.
4. Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan.

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022**

5. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.
6. Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan upaya adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
7. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, kebijakan yang ditetapkan sebagai pedoman dalam operasionalnya sesuai dengan Rancangan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi Kelautan dan Perikanan dengan program yang berpihak kepada masyarakat pesisir dan nelayan pemberdayaan masyarakat pesisir.
2. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam rangka mengembangkan kesempatan berusaha, dan kesempatan kerja, peningkatan devisa melalui ekspor hasil perikanan dan peningkatan PAD.
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Pesisir dan laut serta Pulau-Pulau kecil.

4. Meningkatkan sistem pelayanan melalui pengembangan fasilitas (sarana/prasarana) dalam upaya mengoptimalkan produk kelautan.
5. Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya perikanan.

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara maka Program Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program Pemberdayaan ekonomi Masyarakat Pesisir
2. Program Peningkatan Kesadaran Penegakan hukum dalam pendayagunaan Sumberdaya Laut
3. Program Pengelolaan Budidaya Perikanan
4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
5. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Adapun Tujuan program-program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat pesisir

- Menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir

2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

- Meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan air payau dan laut
- Menyediakan induk dan benih unggul
- Pencegahan hama dan penyakit ikan
- Restocking perairan umum
- Pembangunan/ perbaikan dempon air payau dan laut
- Pembangunan/ perbaikan saluran irigasi

3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

- Meningkatkan pendapatan nelayan
- Meningkatkan produksi perikanan di laut dan perairan umum
- Meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui asuransi nelayan yang diharapkan pada tahun 2022 akan mengcover 10 000 orang nelayan sehingga resiko kecelakaan nelayan saat melaksanakan usaha penangkapan semakin kecil.
- Penanganan konflik nelayan

4. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

- Meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan

- Diversifikasi hasil olahan perikanan
- Peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan
- Penerapan system rantai dingin

5. Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan

Sumberdaya Laut

- Meningkatnya jumlah produksi perikanan
- Terwujudnya penegakan hukum di laut
- Terselenggaranya pengawasan sumberdaya laut
- Meningkatnya kesadaran nelayan dalam mematuhi aturan yang berlaku

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

Untuk menjabarkan dan mengimplementasikan visi dan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun yaitu dari Tahun 2019-2023 maka yang menjadi tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah :

- a. Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir.
- b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan.
- c. Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat.

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022

- d. Mendorong pertumbuhan industri dan ekspor hasil perikanan.
- e. Mendorong dan meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang produktif.
- f. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui konservasi dan rehabilitasi sumberdaya perikanan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2022 diuraikan pada tabel (*Lampiran*).

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan dokumen rancangan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara ini merupakan bahan pembahasan untuk disinergikan dengan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara serta untuk dibahas dalam forum OPD Provinsi.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang memuat rencana dalam kurun waktu satu tahun telah disusun sesuai dengan tahapannya dengan melibatkan semua pihak yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara telah memperhatikan permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi, juga memperhitungkan tantangan dan peluang untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan terhadap pembangunan perikanan dan kelautan di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan visi, misi yang ditetapkan, ditempuh melalui kebijakan program dan kegiatan yang dihimpun berdasarkan Forum OPD dan Musrenbang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera TA.2021, Program dan Rencana Kerja yang dihasilkan melalui Sinkronisasi tersebut dipadukan dan disinkronkan dengan rencana program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang dituangkan dalam Renja ini.

Program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diupayakan agar terlaksana dengan maksimal berdasarkan **PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022**

prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan dan akuntabel, dan untuk keberhasilan dari program dan kegiatan ini sangat diperlukan partisipasi semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat dan juga DPRD Provinsi. Dan pada akhir tahun wajib dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan, dan mengetahui penyebab masalah yang menghambat pencapaian tujuan, sasaran dimana hasil dari evaluasi tahunan tersebut dituangkan kedalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera ini disusun sebagai pedoman Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan program dan kegiatan TA 2022.

Medan,

2022

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN


MULYADI SIMATUPANG, S.Pi, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701025 199703 1 003

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022**